

KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN PADA KECAMATAN TORUE KABUPATEN PARIGI MOUTONG



Oleh: Fedrik Litaniawan¹ dan Suasa²

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan pada kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang ada di kecamatan Torue kabupaten Parigi Moutong menggunakan dasar survei dengan tipe penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ditetapkan pada kecamatan Tome kabupaten Parigi Moutong. Latar belakang penulis memilih judul mengenai kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan adalah bagaimana keadaan yang terjadi dilapangan dengan modal yang cukup dengan suatu tujuan yang baik mengapa program ini belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah masih rendahnya sumberdaya manusia, Tingkat pendidikan yang masih rendah, minimnya jumlah staf pemberdayaan dan keahlian yang dimiliki sampai pada kurangnya relasi antara pemerintah kecamatan Torue sebagai pelaksana dikecamatan dengan pemerintah kabupaten Parigi Moutong sebagai pusat kontrol di daerah.

Keyword: *Kebijakan, PNPM, Pedesaan*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kebijakan program nasional pemberdayaan mandiri pedesaan pada dasarnya merupakan suatu program dan terobosan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Dimana program ini memiliki dua program utama yaitu bantuan modal dan pembangunan sarana prasarana penunjang ekonomi pedesaan kecamatan torue adalah salah satu kecamatan yang berada di daerah parigi moutong dimana sebagai kabupaten yang berkembang dengan berbagai sumber daya yang ada, program ini diharapkan menjadi suatu saluran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu dan kemandirian masyarakat. Sebahagian besar penduduk dikecamatan ini adalah petani dimana semua tersebar dimasing-masing desa yang ada sehingga dengan adanya bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dengan demikian bantuan dan program ini sangatlah membantu masyarakat yang menjadi latar belakang pengembangan program ini di kecamatan torue.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah

1 Mahasiswa Jurusan Administrasi Fisip Untad

2 Dosen Jurusan Administrasi Fisip Untad

dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional penanggulangan kemiskinan, salah satunya dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Dalam rangka pelaksanaan dan Inpres Desa Tertinggal (IDIT) dan P3DT dengan Inpres Nomor 5 Tahun 1993 yang dimulai tahun 1998/1999 dan berakhir pada tahun 2001, khususnya dalam rangka peningkatan keterpaduan dan kesinambungan kegiatan sosial, ekonomi dan prasarana pedesaan serta untuk memperluas cakupan kebutuhan masyarakat pedesaan, pemerintah telah menindak lanjuti program ini dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan yang disingkat PNPM Mandiri.

Memperhatikan pentingnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ini dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang selanjutnya disebut UEP, simpan pinjam khusus perempuan yang selanjutnya disebut SPP, dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi pedesaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.
2. Faktor apa yang menjadi penghambat ?

METODOLOGI

Salah satu sumber data penelitian, antara lain Informan. Informan dipilih untuk menunjukkan realitas sosial yang dipelajari tidak lepas dari faktor-faktor kontekstual yang bersifat kritis. Berdasarkan uraian ini ditetapkan pengelompokan dengan perkiraan jumlah informan, sebanyak 6 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik yang dilakukan akan meliputi hampir pada setiap bidang kehidupan manusia ia berwujud dalam penyelesaian konflik, pemberian tanda penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat, pungutan pajak, pengaturan perkawinan, dan sebagainya. Beberapa ahli memandang studi kebijakan publik merupakan dimensi

baru dalam administrasi publik yang diambilnya tentu ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat banyak.

Menurut S. Prajudi Admosudirdjo (1989: 158-159) mengatakan bahwa Kebijakan itu merupakan upaya atau usaha untuk menjawab suatu problematik (oleh karena pada umumnya di dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak ada problem tunggal namun selalu merupakan sekelompok masalah-masalah yang berkaitan kelompok masalah lain secara erat) yang tertentu, dengan mempergunakan sarana-sarana atau instrument-instrumen policy yang tertentu, dan menurut suatu urutan waktu yang tertentu pula.

Definisi kebijakan yang tersebut di atas, menggambarkan pada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun secara makro tidak ditunjukkan bagaimana cara untuk menghadapinya. Kebijakan harus memberikan dampak yang positif pada lingkungan masyarakat.

Kebijakan menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan hasil akhir dan suatu keputusan yang bersifat sah dan mengikat bagi pelakunya.

Pemberdayaan Masyarakat

Ciri-ciri dan manajemen yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Secara bertahap, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan harus diletakkan kepada masyarakat sendiri
2. Kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber sumber yang harus ditingkatkan.
3. Memperhatikan variasi local
4. Menekankan sosial learning antara birokrasi pemerintah dengan komunitas, dan
5. Membentuk jaringan not working antara birokrasi pemerintah dengan lembaga sosial masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan.

Menurut Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho (2007 : 26-27) mengatakan bahwa: Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses diniana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan) di dorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Menurut Y.C. Yen dalam Islami (2004 : 27) mengatakan bahwa setiap penggerak pembangunan yang akan memperdayakan masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan
2. Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik Kepentingan dan kebutuhannya.
3. Belajarlah dan mereka supaya dapat dipahami apa yang ada dibenak mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki.
4. Ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan.
5. Ajak dan libatkan mereka dalam proses pelaksanaan
6. Mulailah dan apa yang masyarakat ketahui dan pahami
7. Jangan berikan penyelesaian akhir kepada mereka tetapi beri kebebasan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya.

Pada aspek lain, pemberdayaan sangat terkait dengan kemitraan yaitu melibatkan unsur-unsur yang memiliki status sejajar dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategis untuk mencapai suatu pembangunan dalam jangka panjang.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh sebagai faktor yang saling berkaitan dengan tingkat pendapatan, kesehatan, akses, terhadap barang dan jasa, kreasi dan gender serta kondisi lingkungan. Dalam hal ini kalau melihat strategi nasional penanggulangan kemiskinan didefinisikan, kemiskinan tersebut adalah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.

Kemiskinan tidak lagi mempengaruhi hanya sebatas ketidiclakmampuan ekonomi, tetap juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbudakan, perlakuan seseorang atau sekelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Artinya, masalah kemiskinan dilihat bahwa kebutuhan masyarakat itu bermacam-macam sehingga masalah kemiskinan manusia dipandang dan berbagi segi.

Menurut Smeru dalam Soeharto (2005 7-8) menyatakan dimensi kemiskinan sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, pant bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha yang diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang mewujudkan kemandirian penduduk miskin dengan menerapkan prinsip gotong royong, kewaspadaan, dan partisipasi yang memiliki pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 1993 tentang penanggulangan kemiskinan, dikemukakan bahwa: “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pedesaan melalui modal usaha dan penyediaan sarana yang menunjang ekonomi pedesaan. Juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat. Melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian kegiatan”

Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya peluang bagi peran aktif masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Hal inilah yang menjadi wujud dan pemberdayaan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha yang diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang mewujudkan kemandirian penduduk miskin dengan menerapkan prinsip gotong royong, kewaspadaan, dan partisipasi yang memiliki pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 1993 tentang penanggulangan kemiskinan, dikemukakan bahwa:

“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pedesaan melalui modal usaha dan penyediaan sarana yang menunjang ekonomi pedesaan. Juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat. Melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian kegiatan”

Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Pedesaan tergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya peluang bagi peran aktif masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Hal inilah yang menjadi wujud dan pemberdayaan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Jika kita berbicara mengenai kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan torue maka pembahasan penelitian akan memfokuskan pada poin-poin yang ada yakni mengenai penilaian program yang ada, bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan yang ada, relasi antara pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan torue dan pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan yang ada, isi kebijakan yang dihasilkan, apakah semua itu memang menjadi kebutuhan masyarakat kecamatan torue sampai pada pengimplementasian kebijakan dilapangan.

Penilaian

Penilaian merupakan unsur pertama dalam mengukur sebuah kebijakan yang telah di implementasikan dalam kurun waktu tertentu. indikator penilaian ini tidak hanya tertuju pada hal-hal yang bersifat sarana penunjang kegiatan organisasi, namun unsur yang lebih penting adalah menilai kebijakan pemerintah meliputi isi dan sasaran kebijakan serta dampak yang dihasilkan. Penilaian tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai tercapai atau tidaknya sebuah kebijakan atau masalah telah terselesaikan penilaian juga berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penilaian terhadap evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan tonic kabupaten Parigi Moutong diarahkan pada penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui dua program utama yakni pemberian modal usaha bagi masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang perekonomian masyarakat.

Dari indikator yang ada mengenai penilaian pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan melalui wawancara penulis dengan penguna PNPM mandiri pedesaan Ketut Maniati tanggal 14 Agustus 2013 sebagai berikut:

Menurut saya dengan dasar pendidikan saya yang hanya tamatan SD, pemberian bantuan melalui program ini sangat membantu saya, dengan waktu yang cukup dalam mengembalikan modal usaha saya dapat mengembangkan usaha yakni penjualan buah dan sayur dipasar dengan baik dan lancar hingga sekarang.

Dalam poin di atas penulis melihat bagaimana fenomena yang ada mengenai rendahnya sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Torue namun dengan adanya bantuan pemerintah dan dengan adanya suatu motivasi yang baik dan masyarakat bukan menjadi suatu masalah karena ketika relasi terjadi antara masyarakat dan pemerintahan yang ada kesejahteraan bisa ditingkatkan dan berbagai sektor kehidupan.

Kemampuan Pemerintah

Pemerintah adalah pusat kontrol dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tingkatan dan hierarki kedudukan yang dimiliki pemerintah memiliki suatu kedudukan yang sangat penting dalam semua implementasi kegiatan dalam masyarakat. Camat sebagai pemimpin tertinggi di kecamatan memiliki kedudukan yang sentral baik dalam perencanaan, pembuatan kebijakan sampai pada pelaksanaan dan pengawasan program yang ada di setiap desa.

Kecamatan Torue adalah suatu kecamatan yang cukup mandiri dimana indikator penilaian dapat dilihat dari cara dan pola pengelolaan sumber daya yang ada di masing-masing desa, relasi antara pemerintah kecamatan dan pengurus desa, sampai pada pembagian tugas yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dari pengamatan penulis kecamatan ini memberi ruang bagi setiap desa dalam mengembangkan semua potensi yang ada baik dalam sumber daya dan jasa ataupun organisasi pembangunan seperti koperasi dan usaha kelompok masyarakat lainnya yang ada maupun pada pihak pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan Torue.

Indikator penilaian kemampuan pemerintah khususnya pengelola program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan juga dapat dilihat selama ini melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah anggota yang masih minim peningkatan kualitas memang harus dilakukan melihat data bagaimana program ini sudah berjalan cukup lama yakni 2009 yang sudah berkembang selama lima tahun.

Selain data di atas Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai kemampuan pemerintah dengan informan Rizka pengguna PNPM mandiri pedesaan tanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut:

Menurut saya kemampuan yang dimiliki pengelola PNPM sudah baik dimana saya mendapatkan pelayanan yang ramah, penjelasan angsuran dan pemahaman pinjaman modal, sehingga saya dapat memahami apa yang saya lakukan.

Dan analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan wawancara dan realita lapangan peneliti melihat bagaimana perbaikan sudah mulai dilakukan pengelola PNPM mandiri

pedesaan baik dalam pelayanan administrasi, pemberian informasi dan penguasaan teknologi sehingga proses yang dilakukan dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

Terkait dengan evaluasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan torue kabupaten Parigi Moutong berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan pengguna PNPM mandiri pedesaan tanggal 20 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Menurut saya kemampuan pengelola program nasional mandiri pedesaan di kecamatan torue sudah baik saya melihat bagaimana masukan-masukan yang diberikan masyarakat diterima dengan baik kemudian pembangunan baik irigasi, gorong-gorong dan perbaikan jalan sudah sangat membantu kami dalam mengelola persawahan kami khususnya dalam pengairan dan transportasi.

Selain melakukan wawancara dengan pelaksana program PNPM mandiri pedesaan di lingkungan desa peneliti juga berusaha mencari informasi dan pemerintah kecamatan sebagai pusat kontrol dan pelaksanaan kebijakan di kecamatan Torue melalui wawancara dengan informan Ketut Sudarta bendahara kecamatan Torue tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut:

Berbicara kemampuan tentu bicara mengenai kualitas pelayanan yang ada, mungkin ditingkat pelaksanaan sudah cukup baik, namun pendataan yang ada mengenai masyarakat miskin mungkin staf pemberdayaan harus lebih sering turun kelapangan, khusus relasi dengan pemerintah kecamatan data yang diberi harus jelas baik mengenai pencairan dana, hasil pembangunan dan pengembangan program sehingga ada suatu keadaan yang seimbang antara program pemerintah daerah dan PNPM MP yang mestinya berjalan beriringan.

Dan data yang ada diatas dapat kita lihat bagaimana komitmen harus dimiliki semua pengelola baik pemerintah maupun pengelola PNPM mandiri pedesaan dalam mewujudkan suatu keadaan yang baik, seimbang dan tentunya mensejahterakan masyarakat di kecamatan torue.

Faktor-Faktor Penghambat

1. Rendahnya sumber daya khususnya dalam latar belakang pendidikan yang masih rendah masih menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.
2. Masih tidak adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dalam hal pemerintah daerah Parigi Moutong dan pengelola program PNPM mandiri pedesaan yang ada di kecamatan torue kabupaten Parigi Moutong.
3. Transparansi yang masih kurang antara pengelola PNPM mandiri pedesaan dan pengelola yang ada di desa keterlambatan dana terkadang membuat pembangunan menjadi terhambat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Evaluasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dikecamatan torue sudah baik hal ini dilihat dan indikator penilaian dan respon masyarakat pada program yang dilaksanakan.
2. Adapun faktor penghambat masih terletak pada lingkungan administrasi dan birokrasi yang mengelola program.
3. Karakteristik penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai petani harus mendapatkan suatu perhatian yang lebih.

SARAN

1. Disarankan pada implementator dapat meningkatkan sumber daya yang ada melalui bentuk-bentuk bantuan dalam pengelolaan PNP di kecamatan torue.
2. Disarankan pada pemerintahan daerah parigi moutong dapat lebih mendukung program ini baik secara materi dan peningkatan kualitas staf pemberdayaan yang ada.
3. Perlunya suatu sistem yang sederhana khususnya dalam pemberian modal usaha.
4. Disarankan bagi pemerintah kecamatan torue dan pengurus desa yang tersebar di tujuh desa yang ada memberi data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sarjono dan Trilaksono Nograo. 2007. *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Diera Otonomi Daerah*. Fiaunibraw. Malang
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Hikma, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Humaniora Utama*. Press. Bandung
- Jslani. M. Irfan. 2004. *Dasar-dasar Administisasi Publik dan Manajemen public*. Malang. Program Studi Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas. Brawijaya
- James E. Anderson dalam Pandji Santoso. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Grod Grovernance*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Korten dan Syahrir. 1984. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obar. Jakarta
- Kaenjaraningrat. 1994. *Masyarakat Desa di Indonesia*. LP3ES. Jakarta
- Maelyarto, dalam Nugroho. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tanlangan*, Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Masri Slangarimbun dan Sofian Effendi. 1997. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfebata. Bandung
- S. Prajudi Admosudirdjo. 1989. *Dasar-dasar Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia. Jakarta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Gaya Media; Yogyakarta

- Soeyanto. 1991. *Mengenal Masyarakat Desa, Suatu Pendekatan Sosiologi*. Fakultas Sospol UGM. Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditania. Bandung.
- Satori, Djam'an dan Komariah,Aan. 2010. *Metodologi Penelirain Kualitatif* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: R dan D.Alfabeta
- Adi sasmita, Raharjo. 2006 *Pembangunan Perdesaaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, Matheaw. B, dan Huberman A. Micheal. 1992. Terjemahan Tjetjep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif Jakarta: UI Pr*
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Phenomenologi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh* Penelitian. Bandung: Lidya Padjajaran.
- Martoyo. 1996. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matheaw. B, dan Huberman A. Micheal. 1992. Terjemahan Tjetjep Rohendi. *Analisis Data Kualitatif Jakarta : UI Press*.
- Perundang-Undangan**
- Undang-undang Dasar 1945. Pasal 34 Ayat(2) dan (3)
- Inpres Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Penanggulangan Kemiskinan